

Kajian Teori Distribusi Dalam Ekonomi Syariah (Study of Distribution Theory in Islamic Economics)

F. X. Bhakti Hendrakusuma
Universitas Gajayana Malang

Abstrak: Tulisan ini mencoba mengkaji tentang salah satu aspek penting dalam teori ekonomi yakni teori distribusi, dalam perspektif syariah yang dimulai: dengan kelemahan sistem distribusi kapitalis, persoalan-persoalan yang timbul dari distribusi kapitalis dan diakhiri dengan upaya dekonstruksi sistem distribusi dalam perspektif syari'ah. Berkenaan dengan teori distribusi, dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Teori kapitalis dan teori Islam (syari'ah) yang masing-masing memiliki dasar pemikiran yang mendalam namun berbeda dalam pemberian jalan keluar atau solusi atas permasalahan ketidakmerataan distribusi baik distribusi kekayaan maupun distribusi keadilan. Sistem ekonomi kapitalis cenderung pragmatis dalam penyelesaian masalah ekonomi dalam lingkup masyarakat maupun negara, Sementara sistem ekonomi Islam (syari'ah) lebih lebih bertujuan pada penekanan integralitas horizontal dan vertikal, mendorong tercapainya kesejahteraan dan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Kata kunci: Teori Distribusi, Ekonomi Syariah

Abstract: This paper tries to examine one of the important aspects of economic theory, namely distribution theory, in the perspective of sharia that begins: with the weakness of the capitalist distribution system, the problems arising from capitalist distribution and ends with the effort to deconstruct the distribution system in the shari'ah perspective . With regard to the theory of distribution, in a capitalist economy is done by giving freedom of freedom and freedom of effort for all individuals of society, so that every individual society is free to obtain wealth that he is capable of and in accordance with the production factors he has by not paying attention to whether the distribution is evenly felt by all individual community or only partially. The results of the study show that the Islamic economic system strongly protects the interests of every citizen both rich and poor by giving moral responsibility to the rich to pay attention to the poor. Capitalist theory and Islamic theory (shari'ah), each of which has a deep but different rationale in providing solutions or solutions to the problem of inequality in distribution of both the distribution of wealth and the distribution of justice. The capitalist economic system tends to be pragmatic in solving economic problems within the community and the state, while the Islamic economic system (sharia) is more aimed at horizontal and vertical integrality emphasis, encouraging the achievement of prosperity and success in both the world and the hereafter.

Keywords: Distribution Theory, Islamic Economics

Alamat korespondensi:

F. X. Bhakti Hendrakusuma, Universitas Gajayana Malang

PENDAHULUAN

Dalam kaidah ekonomi, teori distribusi adalah upaya sistematis untuk menjelaskan pembagian pendapatan nasional antara pemilik faktor-faktor produksi lahan, tenaga kerja, dan modal. Secara tradisional, para ekonom telah mempelajari bagaimana biaya faktor dan ukuran pengembalian dari sewa mereka, upah, dan keuntungan adalah tetap (Kenneth

E. Boulding, Encyclopedia Britannica). Dalam perspektif lain, menurut Nitisemito (1993, p.102), saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang atau jasa-jasa dari produsen kekonsumen. Dan menurut Kotler (1991:279) saluran distribusi adalah sekelompok

perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Dari pandangan para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.

Pembahasan terkait pengertian dan makna distribusi tidak lepas dari konsep moral ekonomi yang dianut. Apabila konsep dasar yang diterapkan adalah sistem kapitalis, maka permasalahan distribusi yang akan timbul adalah adanya perbedaan yang mencolok pada kepemilikan, pendapatan dan harta peninggalan. Jika asas yang mereka anut adalah sosialisme, maka sistem ini lebih melihat kepada kerja sebagai asas dasar dari distribusi pendapatan. Dan hasil yang nantinya akan diperoleh tergantung pada usaha mereka. Oleh karena itu kemampuan (*capability*) dan bakat (*talent*) seseorang sangatlah berpengaruh pada distribusi pendapatan. Dan untuk mewujudkan kebersamaan, negara mempunyai seperangkat aturan dan ketetapan yang mengatur alokasi produksi dan cara pendistribusian kekayaan alam serta sumber-sumber ekonomi lainnya.

Dalam pemahaman akidah Islam, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian, hari akhirat nantinya. Maka dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan juga menguntungkan masing-masing pihak. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah (tukar-menukar yang membawa manfaat) antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika

terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memantik konflik individu maupun konflik sosial.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri kesengsaraan yang terjadi dimuka bumi ini adalah dengan mengaplikasikan keadilan ekonomi yang pada akhirnya, hal ini akan menjadikan kebahagiaan mudah dicapai dengan penerapan perekonomian yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Secara tegas Islam menggariskan para penguasa, agar meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak yang diterapkan atas kekayaan seseorang bertujuan untuk membantu yang miskin. Sementara dalam Islam Allah mensyari'atkan (mewajibkan) zakat. Jika hal ini dijadikan konsep distribusi pendapatan, InsyaAllah sistem perekonomianpun akan membaik, berjalan lancar dan tercapai pemerataan kesejahteraan.

Dalam spektrum pola pikir konvensional, ilmu ekonomi merupakan ilmu mengenai cara-cara manusia atau masyarakat dalam menentukan pilihan dengan atau tanpa uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan-penggunaan alternatif untuk memproduksi berbagai barang atau jasa serta membaginya untuk dikonsumsi baik pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang kepada berbagai golongan dan kelompok masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang membahas permasalahan-permasalahan seperti *problem of choice*, kelangkaan sumber produktif, penggunaan uang, serta permasalahan produksi dan distribusi. Oleh karena itu, setiap sistem ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk

menemukan solusi baru dalam pemecahan masalah ekonomi terutama dalam bidang produksi dan distribusi.

Sebagai agama, dan sekaligus pandangan hidup (*way of life*), Islam berpendapat bahwa segala hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia pada dasarnya telah di takdirkan sedemikian rupa oleh Allah SWT, sehingga segala permasalahan yang muncul pada hakekatnya telah dipersiapkan pula jawabannya. Dalam konteks ini paradigma konvensional di atas yang memandang masalah ekonomi muncul karena faktor kelangkaan sumber daya produktif yang dihadapkan dengan patron kebutuhan manusia yang tidak terbatas, di pandang oleh sebagian kalangan ekonom Muslim kontemporer tidaklah tepat. Sebab, dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang benar sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Qomar: 49 Artinya: "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran", bagi kalangan ini, permasalahan ekonomi muncul karena adanya sistem distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat dari sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap yang lemah. Oleh sebab itu kalangan ini menilai bahwa istilah ekonomi tidak pernah ada dalam Islam, sebab antara Islam dengan ilmu ekonomi sama sekali tidak ada hubungannya. Pandangan seperti ini sebagaimana diungkapkan oleh kalangan yang sepaham dengan golongan Baqr Sadr.

Ada 4 (tiga) faktor utama dalam kegiatan ekonomi yang disepakati oleh para ekonom, yakni Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Investasi. Dua aktifitas pertama kemudian dijabarkan dengan pertanyaan *What to produce*, *How to produce* dan *For whom to produce*.

What and How berkaitan dengan materi dan proses teknis produksi, sedangkan *For whom* menjadi acuan target distribusi. Sementara *Why* berkaitan dengan alasan keputusan dan keperluan yang mendasarinya. Karena itulah, distribusi seringkali disederhanakan dalam istilah sempit yang disebut pemasaran (*marketing*). Namun, makalah ini tidak berbicara tentang distribusi dalam pengertian *market share* dan strategi *marketing*. Makalah ini lebih bertujuan kepada aspek utama distribusi (*core of distribution*) dalam pengertian yang lebih mendasar, yakni penyebaran atau perputaran ekonomi dan moralitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam ditegakkan di atas tiga asas utama, pertama, konsep kepemilikan (*al-milkiyah*); Kedua, pemanfaatan kepemilikan (*al-tasharuf fil al-milkiyah*); Ketiga, distribusi kekayaan di antara masyarakat (*tauzi'u altsarwah baynan -nas*).

Wacana perputaran ekonomi dalam skala negara acapkali diterjemahkan sebagai upaya dalam pemerataan kesejahteraan bagi warga negara. Wacana inilah yang kemudian memunculkan dikotomi blok Timur (negara-negara yang menganut paham Sosialisme) dan blok Barat (negara-negara yang menganut paham Liberalisme/ Kapitalisme). Sederhananya, blok Timur memprioritaskan pemerataan kesejahteraan (*distributional prosperity / equality*), sekaligus mengenyampingkan perbedaan komparatif antar individu. Di sisi yang lain, blok Barat lebih mengedepankan kebebasan dan penghargaan terhadap perbedaan komparatif dari kemampuan individu. Adapun bidang kajian yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi yang mana distribusi memegang posisi penting dalam teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun sistem

ekonomi kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkorelasi dengan aspek ekonomi saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial dan politik yang menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional hingga saat ini.

Realitas yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan di mana-mana. Bahkan Amerika sebagai kiblat ekonomi dunia pun tak lepas dari kondisi ini dimana perbedaan yang paling mencolok terdapat pada ketidaksamaan upah berdasarkan perbedaan gender (laki-laki dan perempuan).

Menanggapi kenyataan tersebut Islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menjadi solusi baru permasalahan *inequality* (ketidaksamaan) ini dan sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara. Dalam makalah ini memfokuskan pembahasan pada bagaimana gambaran singkat dari sistem ekonomi kapitalis dan Islam serta konsep dari masing-masing tentang distribusi (distribusi pendapatan dan kekayaan) dengan pendekatan filsafat ekonomi Islam agar mendapat gambaran yang jelas tentang keunggulan sistem ekonomi Islam (syari'ah).

2. Permasalahan

Tulisan ini mencoba mengkaji tentang salah satu aspek penting dalam teori ekonomi yakni teori distribusi, dalam perspektif syariah yang dimulai dengan kelemahan sistem distribusi kapitalis, persoalan-persoalan yang timbul dari distribusi kapitalis dan

diakhiri dengan upaya dekonstruksi sistem distribusi dalam perspektif syari'ah.

3. Kajian Teori Distribusi

a. Komparasi sistem dan konsep ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi syariah dalam distribusi

Berkaitan dengan masalah distribusi, sistem kapitalisme menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dan kekurangan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi yang dapat memecah masalah kemiskinan pada mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah dengan meningkatkan produksi.

Dengan demikian ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*), sebab dengan banyaknya pendapatan nasional maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan *kebebasan memiliki* dan *kebebasan berusaha* bagi semua individu masyarakat sehingga setiap individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan memberikan kekayaannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia.

Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah

para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat), oleh karena itu hal yang wajar kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadilah ketimpangan (*ketidakadilan*) pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Berbeda dengan ilmu ekonomi kapitalis, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan ekonomi Islam sebagai kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Alquran, sunnah dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. Jadi sangat jelas bahwa ekonomi Islam terkait dan mempunyai hubungan yang erat dengan agama yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis.

b. Konsep moral Islam dalam Distribusi Pendapatan

Menurut paham kapitalisme, setiap individu harus memiliki kebebasan sepenuhnya agar ia dapat memproduksi kekayaan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kemampuan yang ia miliki sejak lahir. Paham kapitalisme juga mengakui tak terbatasnya hak individu dalam pemilikan pribadi serta menghalalkan pendistribusian yang tidak adil. Pandangan ekstrem lainnya yaitu paham komunisme menyetujui penghapusan kebebasan individu dan pemilikan pribadi secara menyeluruh, dan pada saat yang sama menginginkan pemerataan ekonomi di antara penduduk. Dengan kata lain, paham kapitalisme menekankan pada produksi kekayaan, sedangkan paham komunisme pada distribusi kekayaan,

dengan tidak memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam konteks ini, Islam mengambil jalan tengah antara pola kapitalis dan sosialis yaitu tidak memberikan kebebasan mutlak maupun hak yang tidak terbatas dalam pemilikan kekayaan pribadi bagi individu dalam lapangan produksi, dan tidak pula mengikat individu pada sebuah sistem pemerataan ekonomi yang di bawah sistem ini ia tidak dapat memperoleh dan memiliki kekayaan secara bebas. Islam menganggap bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna, paling mulia dan bahkan manusia diberikan kepercayaan sebagai khalifah yang bertugas untuk mengelols dunia guna mencapai kemakmuran.

Merujuk pada pesan Al-Quran dalam bidang ekonomi, dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Maka karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun nonmateri dengan bekerja / berjuang untuk mendapatkan materi / harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan dan ketetapan yang ada. Maka dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan mutlak dari Allah, konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif pemaksimalan keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk maksimalisasi keuntungan akhirat. Urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat.

Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktifitas ekonomi. Semua ini dilatari adanya ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan akan sulit dicapai tanpa

adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Qardhawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu Nilai kebebasan dan Nilai keadilan.

1. Nilai Kebebasan

Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusikekayaan adalah persoalan tersebut erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah danmentauhidkan-Nya, dan karena keyakinanya kepada manusia.Tauhid mengandung makna bahwa semua yang ada di dunia dan alam semesta adalah berpusat pada Allah. Maka hanya kepada Allah saja setiap hamba melakukan pengabdian, Dia-lah yang menentukan rezki dan kehidupan manusia tanpa seorangpun bisa mengaturnya. Siapa saja yang mengatakan bahwa dia bisa memberikan rezki pada orang lain maka berarti orang tersebut telah sombong dan melanggar otoritas Tuhan.

Sesungguhnya kebebasan yang disyari'atkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan. Tapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai "keadilan" yang diwajibkan oleh Allah SWT. Hal itu karena dalam perilaku manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah SWT padanya untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan keberlangsungan hidup. Sementara perilaku / tabi'at manusia yang lain adalah bahwa manusia senang mengumpulkan harta sehingga karena saking cintanya kadang-kadang keluar dari batas kewajaran.(QS:102)

2. Nilai Keadilan

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syari'ah dan akhlak (moral). Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral ataupun materil. Ia adalah tawazun antara individu dan komunitas, antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi yang benar adalah keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakann kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam pemahaman sistem distribusi Islami terdapat 3 poin penting, yakni:

1. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar semua orang
2. Kesetaraan atas pendapatan setiap individu, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan
3. Mengeliminasi ketidaksamarataan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu

C. Pola Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam

1. Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang (yang oleh ulama Hijaz menyebutnya dengan qiradh). Dalam prakteknya mudharabah adalah dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (padangang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Dari aspek

pendistribusian harta kekayaan dapat dilihat dalam skema dimana terjadi bentuk kerja sama antara seorang yang mempunyai surplus unit dengan mitra kerja yang hanya punya skill sekaligus sebagai pihak yang defisit unit. Dengan terjadinya kerja sama antara shahibul mal dengan mitranya dengan sendirinya menjalankan pola distribusi yang adil dan berdasarkan hubungan kemitraan.

2. Musyarakah

Syirkah atau perseroan adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih, yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Musyarakah merupakan juga salah satu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau modal dalam bentuk *coorporate* dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan. Musyarakah berbeda dari *mudharabah*, dalam *mudharabah* pemilik modal tidak diberikan peran dalam menjalankan manajemen perusahaan, sedangkan dalam *musyarakah* juga ada bagi hasil, tapi semua pihak berhak turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial.

4. Pembahasan

Islam memandang pemahaman bahwa materi adalah segalanya bagi kehidupan sebagaimana menurut kaum kapitalis adalah sebuah pemahaman yang salah, sebab manusia selain memiliki dimensi *material* juga memiliki dimensi *non material* (spiritual). Dalam realitanya tampak sekali bahwa paham materialisme membawa kehidupan manusia kepada kekayaan, kesenangan dan kenikmatan fisik belaka dengan mengabaikan dimensi non materi. Dalam ekonomi yang berbasis islam kedua dimensi tersebut (*material* dan *non material*) tercakup didalamnya

sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang dimilikinya, yaitu ketauhidan (ke-Esaan), keseimbangan, kebebasan kehendak dan bertanggung jawab.

Berkenaan dengan teori distribusi, dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja. Teori yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini adalah salah dan dalam pandangan ekonomi islam adalah *dzalim* sebab apabila teori tersebut diterapkan maka berimplikasi pada penumpukan kekayaan pada sebagian pihak dan ketidakberdayaan di pihak yang lain.

Sistem ekonomi berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua pondasi penting, yaitu *kebebasan* dan *keadilan kepemilikan*. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Alquran agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara rang-orang kaya saja,

akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan (QS Al-Hasyr :7).

Dalam sistem ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara *tidak adil*. Fakta empirik menunjukkan, bahwa bukan karena tidak adanya makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan (Ismail Yusanto). Mustafa E. Nasution pun menjelaskan bahwa berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-negara Islam.

Ketidakadilan tersebut juga tergambar dalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari terpaksa harus tetap menderita kemiskinan abadi, karena hanya dengan mengurangi konsumsi hari ini ia dapat menyediakan hasil yang kian bertambah bagi hari esok, dan kita tidak bisa berbuat demikian kecuali bila pendapatan kita sekarang ini bersisa sedikit di atas keperluan hidup sehari-hari.

Sistem ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun

yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang dikutuk. Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, shodaqah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik.

Disinilah titik jelas perbedaan bahwa 2 (dua) model teori distribusi ini, teori kapitalis dan teori Islam (syari'ah) yang masing-masing memiliki dasar pemikiran yang mendalam namun berbeda dalam pemberian jalan keluar atau solusi atas permasalahan ketidakmerataan distribusi baik distribusi kekayaan maupun distribusi keadilan. Sistem ekonomi kapitalis cenderung pragmatis dalam penyelesaian masalah ekonomi dalam lingkup masyarakat maupun negara, Sementara sistem ekonomi Islam (syari'ah) lebih bertujuan pada penekanan integralitas horizontal dan vertikal, mendorong tercapainya kesejahteraan dan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Daftar Pustaka

- An-Nabahan, M Faruq. 2002. Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Chapra, M Umar dkk. 1997. Etika Ekonomi Politik. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ilmi, Makhalul. 2002. Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Haider Naqvi, Syed Nawab. 2003. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasutin, Mustafa Edwin dkk. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi

- Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI). 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rahardjo, M Dawam. 1990. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Sholahuddin, Muhammad. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1991. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi. 2004. *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar, dan Tujuan)*, alih bahasa: M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Abdurrahman Al-Maliki. 2001. *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa: Ibnu Sholah. Bangil : Al-Izzah.
- Adiwarman Azwar Karim. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Affar, Muhammad Abdul Mun'im. 1985. *al-Takhtith wa al-Tanmiyah fi al-Islam*. Jeddah: Dar al-bayan al-Arabi.
- Al-Rubi, Mahmud. *Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima'iyah dalam Majallat al-dirasat al-tijariyah wa al-islamiyah*,
- Markaz Solih Abdullah Kamil li al-dirasat al-tijariyah wa al-islamiyah, nomor 3, tahun ke satu Juli 1984.
- Heri Sudarsono. 2004. *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Ekonisia UII.
- M Iman Indrakusumah, "Zakat dan Sistem Ekonomi Islam" dikutip dari www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=179342&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=291 26 Nopember 2004
- Yasri, Ahmad Abdurrahman, *Al-Tanmiyah al-iqtisodiyah wa al-ijtima'iyah fi al-Islam*, Iskandariya: Muassasah Syabab al-Jami'ah, tt.
- Yusuf Qardhawi. 2001. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press..
- Zainuddin Ahmad. 1998. *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.